

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Bohari. 1999. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama
- Fitriandi, Primandita. 2007. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi
- Munawir. 1992. *Perpajakan*. Jogjakarta: PT. Liberty
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia (konsep dan aspek formal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan (teori dan teknis perhitungan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rusdji, Muhammad. 2007. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Edisi 2. Jakarta: PT. Indeks
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Formal*. Yoyakarta: Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutedi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. Hlm 56.
- Soekamto, Soerjono. 1988. *Pengantar Penelitian Umum*. Jakarta: Universitas Indonesia

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama  
Jakarta: Salemba Empat.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Keempat  
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  
Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak  
dengan Surat Paksa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata  
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010  
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat  
Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK.04/2000  
tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian  
Jurusita Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 109/PJ./2007 tentang Perubahan  
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001  
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta  
Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka  
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No KEP-19/PJ/1995 Tentang Pedoman Tata  
Usaha Piutang dan Penagihan Pajak (TUP3)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.04/2009 Tentang  
Kebijakan Penagihan Pajak.

## **3. Sumber Lainnya**

[Ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1](http://Ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html/m=1)

Muhammad Rizal tentang Pengelolaan Barang/Aset Daerah dalam website  
[dka.acehprove.go.id/pengelolaan-barangaset-daerah/](http://dka.acehprove.go.id/pengelolaan-barangaset-daerah/)